

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	51
Lampiran 2 Hasil Wawancara	54
Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara	69
Lampiran 4 Anggaran dan Realisasi Belanja	72
Lampiran 5 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD	73
Lampiran 6 Form Kartu Bimbingan Tugas Akhir.....	79
Lampiran 7 Ceklist Persyaratan Ujian ugas Akhir.....	81

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan Akuntansi Sektor Publik saat ini, tuntutan terhadap akuntabilitas sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat atas kinerjanya semakin tinggi. Desakan ini menuntut instansi pemerintah untuk menyediakan informasi yang transparan mengenai aktivitas dan hasil kinerja mereka kepada publik (Khadafi, 2022). Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk penyelenggaraan pengelolaan keuangan. Laporan keuangan pemerintah adalah salah satu isu yang penting dalam pemerintahan, karena laporan ini dapat memberikan informasi yang penting bagi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya tentang pengelolaan keuangan Negara. Laporan keuangan yang baik seharusnya merefleksikan pengelolaan anggaran publik secara tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Tegal, dihadapkan pada tantangan untuk menyajikan laporan yang tepat waktu, akurat, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan media resmi yang digunakan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan daerah kepada masyarakat. Setiap tahun, laporan ini diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan diberi opini. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK menunjukkan bahwa laporan tersebut disajikan secara layak dan berkualitas (Antonius, 2023). Untuk menghasilkan

laporan yang memenuhi standar tersebut, diperlukan sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan keuangan. Kompetensi sendiri mengacu pada kemampuan yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan untuk melaksanakan tugas secara maksimal. Selain itu, kualitas laporan keuangan juga ditentukan oleh implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) yang baik.

BAPPEDALITBANG (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan) Kabupaten Tegal, sebagai instansi yang mengelola perencanaan pembangunan dan anggaran, berperan penting dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Namun, meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, masih terdapat beberapa kendala dalam hal penyajian informasi yang sesuai dengan prinsip akuntansi pemerintahan yang berlaku. Hal ini mengindikasikan pentingnya melakukan analisis lebih mendalam terkait kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh Bappedalitbang Kabupaten Tegal, untuk mengetahui apakah laporan tersebut sudah memenuhi standard kualitas yang diharapkan.

Penelitian ini mengambil fokus pada BAPPEDALITBANG Kabupaten Tegal dengan tujuan menelaah kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Secara umum, kualitas laporan keuangan merupakan suatu standar atau tolok ukur yang menunjukkan seberapa baik laporan tersebut dapat memenuhi kebutuhan pengguna informasi, seperti masyarakat atau pihak berkepentingan lainnya. Sebagai pihak yang diberi amanah, Pemerintah

Kabupaten Tegal memiliki kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban melalui laporan keuangan atas pengelolaan anggaran yang telah dilakukan, baik kepada pemerintah pusat maupun kepada publik. Laporan ini menjadi produk akhir dari proses akuntansi yang berfungsi sebagai alat dalam pengambilan keputusan (Sahuleka et al., 2025). Dalam hal ini, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) digunakan untuk mengelola seluruh data dan informasi keuangan daerah.

Permasalahan utama yang teridentifikasi di Bappedalitbang Kabupaten Tegal adalah terdapat keterbatasan kompetensi pegawai dalam memahami penerapan SAP berbasis akrual, yang berdampak pada ketepatan penyajian informasi keuangan. Kurangnya pelatihan dan pembaruan pengetahuan di bidang akuntansi pemerintahan memperparah kondisi ini, sehingga masih ada kekeliruan dalam pencatatan maupun penyajian data. Selain faktor sumber daya manusia, kendala teknis pada penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) juga menjadi tantangan. Sistem ini belum dimanfaatkan secara optimal akibat keterbatasan penguasaan teknologi oleh sebagian pegawai, sehingga proses input data sering terlambat atau tidak sesuai prosedur. Akibatnya, kualitas laporan keuangan yang dihasilkan berpotensi menurun dari aspek relevansi, keandalan, maupun keterbandingan sebagaimana disyaratkan dalam SAP.

Kualitas laporan keuangan yang tidak optimal dapat berdampak pada efektivitas evaluasi anggaran dan pengambilan keputusan publik. Hal ini juga berisiko mempengaruhi penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),

khususnya dalam pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dengan kata lain, kendala internal di Bappedalitbang harus segera diatasi agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi yang transparan, akurat, dan tepat waktu.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penting bagi peneliti untuk melakukan kajian terhadap laporan keuangan pada BAPPEDALITBANG Kabupaten Tegal, Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul: **“Analisis Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah : Studi Kasus Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Tegal”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Tegal?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Tegal.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoris

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pada pengembangan teori akuntansi sektor publik, khususnya dalam hal kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini juga dapat meningkatkan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Manfaat Praktis

a). Bagi Penulis

Penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peneliti dalam menganalisis kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

b). Bagi BappedaLitbang Kabupaten Tegal.

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dalam mengevaluasi kualitas laporan keuangan agar meningkatkan opini laporan keuangan pada BAPPEDALITBANG Kabupaten Tegal.

c). Bagi Politeknik Harapan Bersama

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. Penelitian ini juga dapat membantu mengembangkan kerjasama antara Politeknik Harapan Bersama dengan instansi pemerintah daerah.

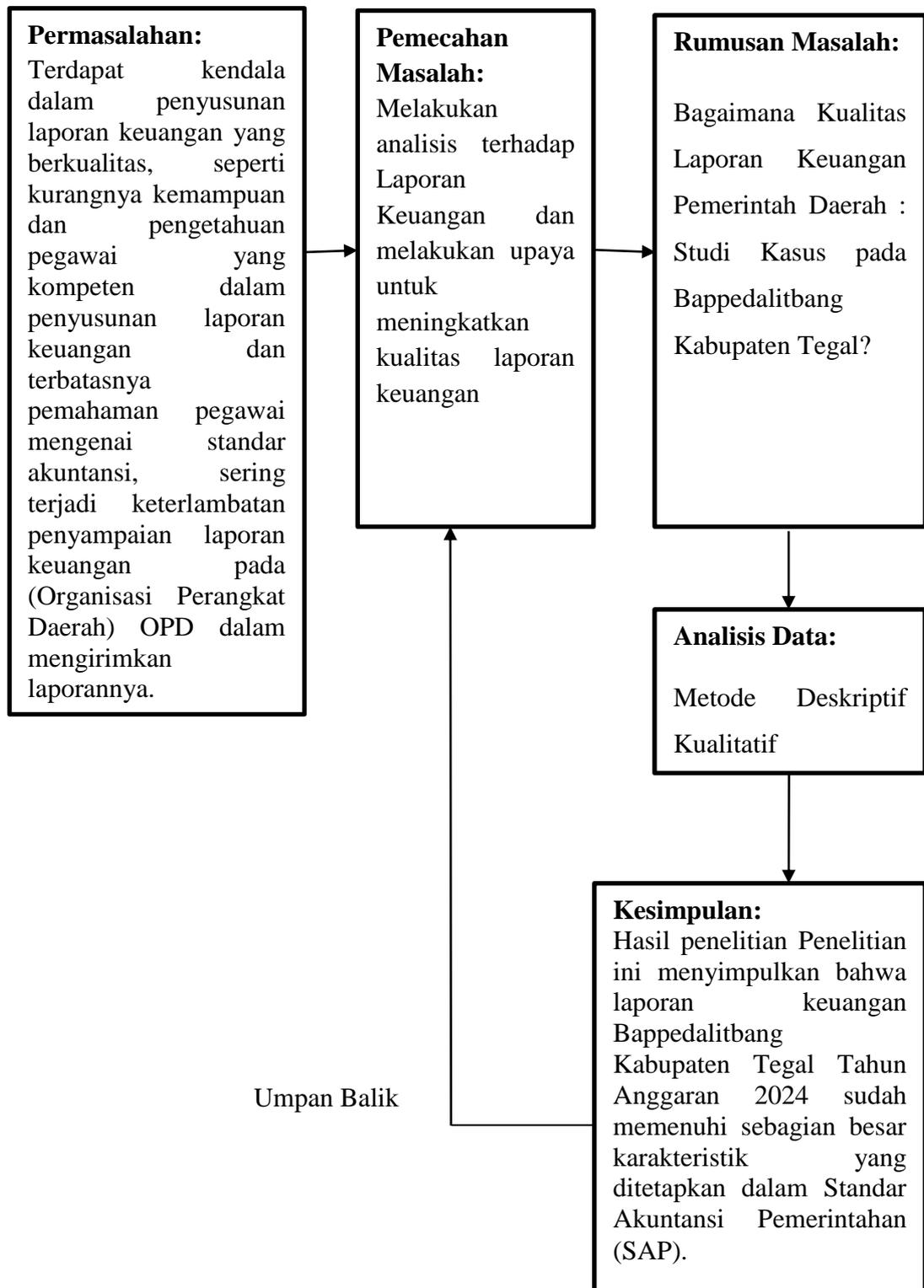
1.5. Batasan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, penelitian ini secara khusus dibatasi pada aspek penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam kurun waktu 2023 hingga 2024. Pembatasan ruang lingkup ini dimaksudkan untuk menjaga efektivitas dan efisiensi proses penelitian, serta didasarkan pada pertimbangan adanya perbedaan temuan dengan penelitian-penelitian terdahulu.

1.6. Kerangka Berpikir

Kualitas laporan keuangan merupakan aspek penting dalam akuntansi pemerintahan yang mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini di latarbelakangi fenomena mencakup kurangnya pelatihan dan pendidikan yang memadai bagi pegawai dan keterlambatan laporan keuangan dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah), yang bisa berdampak pada kualitas laporan yang dihasilkan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dilakukan penyederhanaan dengan kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 1 Kerangka Berpikir

1.7. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis menyusun sistematika penulisan guna mempermudah pemahaman pembaca serta memberikan gambaran menyeluruh mengenai isi laporan. Adapun struktur penulisan tugas akhir ini terbagi ke dalam beberapa bagian sebagai berikut:

a). Bagian awal

Bagian ini mencakup halaman-halaman pendahuluan yang terdiri dari: halaman judul, lembar pengesahan, lembar persetujuan, pernyataan orisinalitas tugas akhir, surat pernyataan persetujuan publikasi untuk kepentingan akademik, halaman persembahan, motto, kata pengantar, abstrak atau intisari, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan lampiran. Seluruh elemen ini bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam menavigasi dan menemukan informasi penting dengan cepat.

b). Bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan masalah, kerangka pemikiran, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini Menyajikan teori-teori yang relevan sebagai dasar konseptual untuk menganalisis permasalahan yang diteliti.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini Menjelaskan lokasi dan waktu pelaksanaan

penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta teknik analisis yang digunakan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tinjauan umum instansi, seperti sejarah singkat instansi, profil instansi, struktur organisasi, tugas dan wewenang/job description, laporan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyajikan ringkasan hasil temuan utama dalam penelitian serta rekomendasi dari peneliti yang diharapkan bermanfaat bagi Bappedalitbang Kabupaten Tegal.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berisi tentang daftar buku, literature yang berkaitan dengan penelitian. Lampiran berisi data yang mendukung penelitian tugas akhir secara lengkap.

c). Bagian Akhir

LAMPIRAN

Bagian ini memuat dokumen pendukung, seperti surat keterangan penelitian dari instansi terkait, kartu bimbingan, spesifikasi teknis, serta data-data tambahan yang relevan untuk memperkuat hasil penelitian.